

INDONESIA DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL DI ASEAN

Prasetya Putra Nugraha
Universitas Harkat Negeri
nugrahaputraprasetya@gmail.com

ABSTRAK

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki kondisi sangat dinamis baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, sehingga hal ini berdampak pada benturan kepentingan nasional di tiap negara. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN memiliki peran utama sebagai “motor ASEAN” yang salah satu peran pentingnya adalah keterlibatan aktif dalam menangani permasalahan hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran strategis Indonesia dalam keterlibatannya menangani dinamika hukum internasional di ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan membaca, mengumpulkan, kemudian menganalisis literatur yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting Indonesia tidak hanya terlibat aktif dalam menangani permasalahan hukum internasional di ASEAN, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di kawasan dengan memanfaatkan posisi geopolitik. Di samping itu Indonesia memiliki peran sentral dalam memediasi konflik antar anggota ASEAN. Sebagai pemimpin ASEAN eksistensi Indonesia sangat menentukan kondisi stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Indonesia, Hukum Internasional, ASEAN.

ABSTRACT

Southeast Asia is a region that has very dynamic conditions both in the political, economic and socio-cultural fields, so this has an impact on clash of national interest in each country. Indonesia as the leader of ASEAN has a major role as the “motor of ASEAN” one of whose important roles is active involvement in handling international legal issues in the Southeast Asian region. The purpose of this study is to analyzing Indonesia’s strategic role in his involvement in handling the dynamics of international law in ASEAN. The research method used is literature study by reading, collecting then analyze the literature that has been obtained. The research result show that Indonesia’s important role is not only actively involved in addressing international legal issues in ASEAN but also has a big influence in maintaining defense and security stability in the region by taking advantage of geopolitical position. Besides that, Indonesia has a central role in mediating conflicts between ASEAN members. As leader of ASEAN Indonesia’s existence is very decisive stability conditions in the Southeast Asia region.

Keywords: Indonesia, International Law, ASEAN

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan regional di Asia yang sangat strategis karena secara geografis kawasan ini diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, sehingga kawasan tersebut menjadikannya sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Selain itu Asia Tenggara memiliki kondisi yang sangat dinamis baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Hal ini sangat berdampak pada kepentingan – kepentingan antar negara di kawasan tersebut yang berbenturan dengan kepentingan nasional di tiap negara.

Dalam perjalanannya hubungan antar bangsa di Asia Tenggara memiliki sejarah yang cukup panjang. Hubungan tersebut ditandai dengan adanya perebutan kekuasaan antarnegara baik di kawasan wilayah daratan maupun maritim. Di kawasan daratan Asia Tenggara ada empat bangsa

yang menjadi aktor politik internasional pada saat itu antara lain Siam, Burma, Khmer, dan Vietnam, sedangkan di kawasan maritim Asia Tenggara terdapat dua kerajaan besar di Nusantara yang memiliki eksistensi yang cukup besar yaitu Sriwijaya dan Majapahit meskipun kedua kerajaan tersebut sejatinya tidak pernah terlibat dalam peperangan. Oleh karenanya bukti tersebut sudah menunjukkan bahwa sejak masa lampau bangsa-bangsa di Asia Tenggara telah menjalin hubungan internasional.

Hubungan tersebut juga berlanjut hingga pasca Perang Dunia ke-2 maupun perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur yang ditandai dengan Perang Vietnam, invasi Vietnam ke Kamboja, termasuk konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun hubungan internasional yang tidak hanya menekankan pada peperangan yaitu dengan membentuk organisasi regional. Organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang pertama kali dibentuk adalah *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO), meskipun organisasi ini sebetulnya dibentuk atas prakarsa Amerika dalam upaya membendung pengaruh komunis di kawasan Asia. Organisasi regional lain di kawasan Asia Tenggara adalah *the Association of Southeast Asia* (ASA) yang dibentuk pada tahun 1961 yang beranggotakan Malaysia, Thailand, dan Filipina. Organisasi tersebut tidak bertahan lama karena terjadinya konflik antara Malaysia dan Filipina atas sengketa wilayah Sabah yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Sulu di Filipina, sehingga adanya konflik tersebut mendorong terbentuknya Konfederasi Maphilindo yang terdiri dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Konfederasi tersebut juga bernasib sama seperti ASA karena adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno. Setelah Presiden Soekarno jatuh dan munculnya Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto Indonesia kembali menjalin hubungan dengan Malaysia termasuk terlibat aktif dalam perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi pemrakarsa organisasi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 yang diwakili oleh Adam Malik bersama dengan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S.Rajaratnam, Thailand oleh Thanat Khoman, dan Filipina oleh Narsisco Ramos.

ASEAN dibentuk atas dasar keinginan untuk berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara, serta kebulatan tekad dari negara-negara anggota untuk mengatasi perbedaan politik, sosial budaya, latar belakang historis maupun agama. Di dalam Piagam ASEAN juga termuat bahwa pembentukan ASEAN sejatinya bertujuan untuk memberikan penjaminan pembangunan yang bersifat berkelanjutan, bermanfaat bagi seluruh generasi, menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak, serta kemakmuran rakyat. Keanggotaan ASEAN kini beranggotakan sebelas (11) negara setelah menyusul enam (6) negara lain diantaranya Brunei Darussalam yang bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, Kamboja pada tahun 1999, dan terakhir Timor Leste melalui KTT ASEAN ke-47 pada 26 Oktober 2005 di Malaysia.

Diantara beberapa negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran sentral dari mulai pembentukan, perkembangan, hingga kepemimpinan dalam organisasi ASEAN. Indonesia juga sering disebut “motor ASEAN” karena perannya yang aktif dalam menggerakkan integrasi kawasan seperti pembentukan Masyarakat ASEAN yang bergerak dalam tiga pilar antara lain Politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, serta penghapusan tarif dan hambatan perdagangan sebagai upaya untuk mempercepat integrasi ekonomi antar anggota. Selain sebagai motor penggerak, Indonesia juga memiliki peran yang besar dalam mediasi konflik antar negara anggota, pemimpin dalam isu kawasan, dan menjadi tuan rumah pada KTT penting.

Peran penting lain Indonesia di ASEAN adalah keterlibatan aktif dalam menangani permasalahan hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. Peran tersebut diwujudkan dalam menggagas Piagam ASEAN atau ASEAN Charter dengan membentuk kelompok kerja bernama *High Level Legal Experts' Group on the Follow-up to the ASEAN Charter* (HLEG) yang beranggotakan para ahli hukum perwakilan dari setiap negara anggota ASEAN guna membahas beberapa isu hukum di kawasan termasuk mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN. Bentuk peran aktif lain dalam keterlibatan menangani permasalahan hukum internasional di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan pembentukan *ASEAN Extradition Treaty* (AET) atau Perjanjian Extradisi ASEAN yang ditandatangani oleh seluruh anggota ASEAN sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara, mengingat letak secara geografis di kawasan Asia Tenggara sangat rentan akan potensi tindak kejahatan, terutama Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Melihat kenyataan tersebut Indonesia memiliki prospek maupun tantangan dalam perannya menangani permasalahan hukum internasional di kawasan Asia Tenggara.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, kemudian menganalisis literatur yang telah didapat. Penelitian ini juga menghubungkan antar referensi terkait dengan topik penelitian yang dibahas. Referensi yang digunakan berupa buku, artikel jurnal maupun prosiding. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dengan mengemukakan informasi dari referensi yang digunakan sebagai data secara luas, dalam dan menyeluruh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Geopolitik Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

Dalam konteks geopolitik, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 merupakan kekuatan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan-permasalahan global, seperti konflik di Laut Cina Selatan, persoalan keamanan di kawasan Asia Tenggara, maupun perubahan iklim menempatkan Indonesia sebagai penghubung antara posisinya sebagai pemimpin regional dan kekuatan global. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan sepertiga wilayahnya adalah perairan memperkuat posisi sebagai jalur perdagangan dengan visi mengedepankan poros maritim dunia.

Dengan visi mengedepankan poros maritim dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kerjasama pertahanan laut di Asia Tenggara. Indonesia juga memainkan peran dalam konsolidasi keamanan dan stabilitas dengan berpartisipasi aktif melalui forum pertahanan dan keamanan di ASEAN seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF), *East Asia Summit* (EAS), dan *ASEAN Defense Ministers Meeting* (ADMM). Konsolidasi tersebut memiliki banyak manfaat, diantaranya memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan, meningkatkan kemampuan pertahanan laut di ASEAN dan mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota ASEAN.

Peran Indonesia dalam Pertahanan dan Keamanan di ASEAN

Perilaku konflik di kawasan negara-negara Asia Tenggara cukup kuat, sehingga berpotensi memunculkan konflik bersenjata serta berpengaruh terhadap kondisi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kondisi dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki pengaruh besar bagi Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan Indonesia.

Sebagai upaya dalam menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dibentuklah sebuah wadah komunikasi yang berkaitan dengan persoalan maupun kebijakan pertahanan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Upaya tersebut diwujudkan dalam pembentukan ASEAN *Defence Ministerial Meeting* (ADMM). ADMM ini memiliki peran signifikan dalam upaya memperkuat pilar ASEAN *Community* dalam bidang politik dan keamanan, serta menjadi instrument penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menjalankan diplomasi pertahanan mereka. Sementara bagi Indonesia ADMM menjadi instrument strategis untuk menjalankan diplomasi pertahanan secara multilateral baik terhadap seluruh negara Asia Tenggara maupun di luar kawasan Asia Tenggara.

Beberapa waktu belakangan ini, dinamika keamanan di Asia Tenggara kembali muncul dan mengalami perubahan dengan melibatkan Cina sebagai kekuatan baru di Asia yang telah memfokuskan kebijakan militernya pada kawasan Laut Cina Selatan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bersama bagi negara-negara di Asia Tenggara. Maka dari itu, Indonesia selalu berupaya untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara dengan berbagai cara seperti diplomasi, dialog-dialog, maupun kerjasama regional. Dalam katannya dengan persoalan Laut Cina Selatan, Indonesia memainkan peran penting yaitu berperan aktif dalam menggulirkan prakarsa dan inovasi berupa interim measures, yakni *Joint Statement on the Application of CUES* dan *Hotline of communication*.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara antara lain:

- Mempromosikan kerjasama pertahanan laut di ASEAN
- Memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas pertahanan laut di ASEAN melalui program pelatihan dan latihan bersama
- Berperan aktif dalam mendorong negara-negara di ASEAN untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mengikuti prinsip-prinsip hukum internasional
- Konsolidasi keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara
- Mendorong kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan laut

Peran Indonesia sebagai mediasi konflik antar anggota

Sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini dilakukan dengan cara menjalin hubungan internasional dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional, salah satunya adalah ASEAN.

Indonesia kembali terpilih menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2023, oleh karenanya Indonesia secara konsisten terus aktif terlibat dalam beberapa isu penting di kawasan Asia Tenggara guna menciptakan wilayah yang damai, adil, dan makmur. Beberapa keterlibatan aktif Indonesia dalam menangani isu penting di ASEAN antara lain adalah:

- Konflik Filipina – *Moro National Liberation Front* (MNLF)
Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Filipina dengan MNLF telah berlangsung selama 1976-2013. Dalam pelaksanaannya Indonesia dibantu Organisasi Konferensi Islam (OKI) guna mencari solusi tuntutan mereka. Pada decade 1990-an Indonesia berhasil memediasi kedua pihak tersebut dan mencapai kesepakatan damai.
- Konflik Thailand – Kamboja
Indonesia bertindak sebagai mediator dalam sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang memanans pada 2011. Konflik ini bermula dari sengketa wilayah sekitar Kuil Preah Vihear

pada tahun 1962, namun di tahun 2025 kedua negara kembali terlibat konflik. Kali ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kembali secara aktif menginisiasi pembicaraan rekonsiliasi tertutup di antara para pemimpin ASEAN, serta mendorong kedua negara untuk mengelola sengketa perbatasan dan berfokus pada kerjasama demi kepentingan bersama. Beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia antarlain yaitu Pencegahan Eskalasi di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi dan berkomunikasi antar anggota ASEAN untuk mencegah meluasnya konflik militer. Selain itu Presiden Prabowo juga melakukan pendekatan dialog langsung untuk meyakinkan kedua belah pihak agar mampu menahan diri dari tindakan yang bisa merugikan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

- **Konflik Vietnam – Kamboja**

Indonesia turut memfasilitasi dialog damai melalui forum *Jakarta Informal Meeting* (JIM) pada 1987 dan 1989. Selain JIM upaya perdamaian lainnya yaitu melalui Perjanjian Paris pada tahun 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara dan secara resmi mengakhiri perang antara Vietnam dan Kamboja.

- **Konflik di Myanmar**

Indonesia berperan aktif dalam menyelesaikan konflik di Myanmar dengan prinsip netralitas dan tidak memihak. Dalam menangani krisis di Myanmar, baik pasca kudeta militer maupun isu kemanusiaan etnis Rohingya, Indonesia menjalankan beberapa langkah strategis antara lain penyelesaian melalui ASEAN, diplomasi pencegahan, serta penanganan pengungsi dan HAM dalam rangka merespons krisis pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan Indonesia dalam keterlibatan menangani permasalahan hukum internasional di ASEAN

Sebagai pemimpin ASEAN Indonesia tentu memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian selain posisinya yang strategis sebagai motor ASEAN, tentu Indonesia memiliki tantangan ke depan dalam keterlibatannya menangani permasalahan hukum internasional di ASEAN. Berikut adalah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menangani permasalahan hukum internasional di ASEAN antara lain:

- Adanya prinsip *Non-Intervensi*, yaitu melarang campur tangan urusan dalam negeri anggota lain. Hal ini sangat menyulitkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dalam menegakkan hukum internasional terutama yang berkaitan dengan krisis politik maupun HAM.
- Tidak adanya mekanisme supremasi hukum regional, sehingga berdampak pada hukum dan kesepakatan internasional lebih bersifat politis dan tidak mengikat.
- Adanya dinamika sengketa wilayah dan perbatasan. Dalam penanganan kasus tersebut seringkali harus memadukan antara hukum internasional dengan konsensus politik di ASEAN yang membutuhkan waktu cukup panjang.
- Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem hukum, politik, dan budaya yang berbeda-beda.
- Adanya kejahatan lintas batas seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia yang membutuhkan penegakkan hukum lintas batas yang kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, Indonesia memiliki peran yang sangat penting sekali dalam menegakkan hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena didorong oleh

beberapa faktor, diantaranya adalah faktor geopolitik yang mana secara geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan dan terluas diantara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Di samping juga secara historis, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki peradaban tertua di Asia Tenggara. Indonesia juga sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya organisasi regional ASEAN.

Indonesia juga memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga pertahanan dan keamanan di kawasan, serta dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia berperan penting dalam memediasi konflik antar anggota ASEAN. Sebagai pemimpin diantara anggota ASEAN Indonesia turut eksis dalam menegakkan hukum internasional di wilayah ASEAN, meskipun tidak ada hukum yang mengikat di wilayah regional ASEAN, namun pengalaman politik luar negeri Indonesia yang mumpuni turut berpengaruh bagi penegakkan hukum internasional di kawasan. Oleh karena itu, eksistensi Indonesia sangat menentukan kondisi dinamika baik itu secara politik, hukum, ekonomi, dan budaya di ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Jailani Sanduan, dkk. Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN. TATOHI; Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 2, April 2021: hal 69-77.
- Arie Y, Wahyudin Arif. Peran Indonesia Dalam meningkatkan Kerjasama Pertahanan Laut Di Asia Tenggara. Jurnal Maritim Indonesia. Juni 2023, Volume 11 Nomor 2.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. Pengantar Hukum Internasional. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025.
- Cipto, Bambang. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eddy Pratomo. Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional. Jurnal Hukum No.1 Vol.16 Januari 2009: 60-72.
- I Komang Sigit Mustika. Peran dan Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Menjaga *Regional Resilience* Di Tengah Kompleksitas Asia Tenggara Tahun 2019-2023. DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional. Vol.2 No.1 Tahun 2025 Hal. 13-23.
- Jerry Indrawan dan Rizky Ridho Pratomo. Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Volume 17 No.2 Hal.172-185.
- Jorry S.Koloay, dkk. Peran Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kawasan Regional Asean di Tengah Perebutan Pengaruh Negara-Negara Great Power. Jurnal Syntax Admiration. Vol.5, No.10, Oktober 2024.
- Natalia Yeti Puspita. Kewenangan Hukum ASEAN Dalam Membuat Perjanjian Internasional Dengan Pihak Eksternal Berdasarkan Piagam ASEAN. Yudistira. Vol.4 No.3 September – Desember 2015.
- Riady Ibnu Khaldun. Dinamika Ekonomi-Politik ASEAN: Optimalisasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas. Journal Of Integrative International Relations, 7:1 (2022) 65-75.
- Sicilliya Mardian Yo'el. Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.
- Sugiharto, dkk. Posisi Geopolitik Indonesia dalam Konteks Hubungan Regional Asia Tenggara. TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025.
- Yudi Rusfiana. Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM). Jurnal Pertahanan, Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2